

BIAYA KONFLIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA

Berkontribusi terhadap hampir USD 12 Milyar dari pendapatan ekspor di tahun 2015, industri minyak kelapa sawit merupakan sektor ekonomi penting bagi Indonesia. Beberapa tahun belakangan, produksi minyak kelapa sawit telah menarik perhatian publik karena perluasannya mengakibatkan deforestasi dan konflik lahan dengan komunitas lokal dan penduduk asli setempat. Dalam merespon hal tersebut, pelaku usaha industri minyak kelapa sawit telah bersepakat untuk melakukan usaha dengan rantai pasokan tanpa-deforestasi dan tanpa-konflik.

Ada **4000** konflik lahan yang terkait dengan industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Hal tersebut berdampak kepada hal-hal mendasar di perusahaan.



PIHAK YANG TERLIBAT



PEMICU



MANIFESTASI



*data di atas berasal dari Kalimantan Barat, Tengah dan Timur

BIAYA

TANGIBLE (USD 70,000 – 2,500,000)

50% to 80% dari biaya operasional perkebunan

Pengeluaran finansial dan kemungkinan biaya lainnya, termasuk:

*Tangible costs : biaya langsung yang dibayarkan dan kemungkinan biaya atau kehilangan potensi dari sumberdaya yang dialokasikan untuk konflik

Kehilangan laba

Biaya staf

Biaya hukum

Kompensasi

Penurunan produksi

INTANGIBLE

(USD 600,000 – 9,000,000)

Pengeluaran yang berhubungan dengan resiko dari:

Konflik berulang / eskalasi

Hilangnya reputasi

Kekerasan terhadap bangunan / manusia

*Intangible costs : Biaya yang terkait dengan risiko dan konsekuensi yang tidak diketahui secara pasti yang mungkin timbul akibat konflik, seperti hilangnya kepercayaan investor atau klien

REKOMENDASI

1. Perbaiki kebijakan di perusahaan dan prosedur tata kelola, termasuk pemberian insentif terhadap pegawai dan indikator kinerja utama
2. Membangun kapasitas dari pemangku kepentingan lokal untuk dapat bertindak sebagai penengah
3. Memperluas pemahaman terhadap sebab, perkembangan dan implikasi dari konflik sosial
4. Mengembangkan praktik baik untuk pencegahan, mitigasi dan resolusi konflik
5. Memulai pencegahan dan mitigasi konflik pada tingkatan yurisdiksi